

Sragen Buka Layanan
Aduan Jalan Rusak

SRAGEN (KR) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sragen meluncurkan aplikasi Patriot Sragen untuk menangani laporan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah setempat. Inovasi baru berupa aplikasi Patriot dari Bidang Bina Marga itu diluncurkan di Aula Kantor DPUPR Sragen, Kamis (3/6).

Aplikasi Patriot Sragen sudah bisa diunduh melalui *Playstore di smartphone Android*. Kepala Bidang Bina Marga, DPUPR Sragen, Albert Pramono Soesanto menjelaskan, selama ini laporan terkait kerusakan jalan dan jembatan dari masyarakat belum dikelola dengan baik. Biasanya laporan itu datang melalui telepon, media sosial, hingga pesan Whats App (WA) petugas.

Terkadang, informasi itu tidak masuk ke database DPUPR sehingga penanganan laporan dari masyarakat itu menjadi tidak maksimal. "Dengan menggunakan aplikasi Patriot Sragen, semua laporan dari masyarakat akan masuk ke database. Ini memudahkan kami dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Penanganan laporan dari masyarakat juga lebih akuntabel," jelas Albert.

Albert menjelaskan DPUPR Sragen berwenang dalam menangani kerusakan 583 ruas jalan sepanjang 1.020,25 km. Sepanjang 2020 lalu, DPUPR menangani laporan kerusakan infrastruktur yang terbagi 18 jenis pekerjaan pada 153 ruas jalan. Total dana untuk pemeliharaan jalan dan jembatan itu mencapai Rp 9,7 miliar. Kendati begitu, Albert mengakui laporan dari masyarakat itu belum dikelola secara akuntabel.

Jenis kerusakan infrastruktur yang dilaporkan masyarakat antara lain jalan berlubang, talut longsor, gorong-gorong rusak, jembatan rusak, penebangan pohon mati yang dapat membahayakan pengguna jalan dan lain-lain. "Setelah aplikasi Patriot Sragen ini diluncurkan, kami tetap akan menerima laporan yang disampaikan melalui WA ataupun media sosial. Namun, kami akan memberi pengarahannya supaya ke depannya, setiap laporan bisa disampaikan melalui aplikasi Patriot Sragen," terang Albert.

Melalui aplikasi Patriot Sragen, masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam menyampaikan laporan terkait kerusakan infrastruktur. Warga cukup mengisi nama pengirim laporan, nomor telepon, uraian terkait kerusakan dan foto kerusakan infrastruktur tersebut.

Albert menegaskan tidak semua laporan kerusakan infrastruktur dari masyarakat itu bisa langsung diperbaiki. Dalam hal ini, DPUPR sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan kerusakan infrastruktur. "Nanti akan kami lihat dulu jenis kerusakannya seperti apa? Masuk kewenangan siapa jalan itu? Sebab, jalan itu bisa jadi jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi atau jalan nasional. Lalu apakah kerusakan jalan itu bersifat darurat sehingga harus diprioritaskan diperbaiki segera," tambahnya. **(Sam)**

WARGA DIMINTA SIAPKAN BERKAS LAMARAN
Temanggung Butuh 3.029 ASN dan PPPK

TEMANGGUNG (KR) - Pemerintah Kabupaten Temanggung menunggu instruksi dari pemerintah pusat dalam membuka pendaftaran penerimaan pegawai tahun 2021. Secara keseluruhan Pemkab Temanggung mendapat 3.029 formasi yang terdiri ASN 945 dan 2.084 Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan, semula pengumuman pendaftaran sekitar akhir Mei 2019, tetapi berdasar keputusan dari Badan Kepegawaian

Negara, diundur sampai batas yang belum ditentukan. "Kami minta warga untuk menyiapkan berkas, begitu nanti dibuka sudah bisa langsung mendaftar. Formasi ASN di Temanggung termasuk yang terbesar," ungkapnya, Jumat (4/6).

Menurut Al Khadziq, Pemkab Temanggung juga sedang menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait dengan kejelasan pengajian untuk formasi PPPK. Informasi awal digaji oleh pemerintah pusat, tetapi dalam perkembangannya dialihkan ke Pemda. "Berda-

sar analisa, Pemkab tidak sanggup menggaji 2.084 orang yang mencapai Rp 116 miliar pertahun. Kemampuan APBD hanya berkisar Rp 12 miliar pertahun untuk 250 pegawai," jelasnya.

Dikatakan, sesuai arahan dari Pemerintah Pusat, jika merekrut PPPK harus semua atau tidak semuanya. Tidak boleh sebagian pegawai.

Karena itu Pemkab Temanggung menyurati Menteri Keuangan agar menambah dana transfer untuk membayar 2.084 pegawai.



KR-Zaini Arrosyid
Bupati Al Khadziq
"Nanti kami akan putuskan setelah menerima jawaban dari Menteri Keuangan," tandas Al Khadziq.

Perekrutan ASN di Kabupaten temanggung terdiri formasi tenaga kesehatan 566 orang dan 379 tenaga nonkesehatan, termasuk tenaga guru. Sedangkan PPPK semuanya untuk formasi guru.

Formasi itu antara lain admin kesehatan 5 orang, dokter umum (9), pamong budaya (1), auditor (4), pustakawan (12), dan rekam medis (1). "Masyarakat Temanggung agar memanfaatkan kesempatan ini, karena perekrutan tidak dibatasi wilayah kabupaten," tegasnya. **(Osy)**

Banjarnegara Bantu 14 Ormas Rp 5,3 Miliar

BANJARNEGARA (KR) - Pemkab Banjarnegara menggelontorkan bantuan dana hibah Rp 5,367 miliar untuk 14 organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan yayasan sosial. Bantuan yang bersumber dari ABPBD tahun 2021 itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Budhi Sarwono kepada pengurus Ormas di pendapa rumah dinas bupati, belum lama ini.

Ke-14 Ormas dan yayasan penerima bantuan dana hibah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banjarnegara Rp 150 juta, DPC Syarikat Islam Rp 745 juta, PD Muhammadiyah 1,561 miliar, PC Nadhlatul Ulama Rp 2,391 miliar, IPHI Rp 20 juta, Dewan Pastoral Paroki St Antonius Rp 50 juta, Gereja Kristen Jawa Banjarnegara Rp 100 juta. Yayasan Sirajul Munajiyah

Rp 50 juta, Yayasan Kyai Simbar Jaya Rp 50 juta, Yayasan Insan Mandiri Rp 150 juta, Yayasan Sahabat Muda Indonesia Rp 30 juta, Yayasan Al Aftal Jannah Rp 20 juta, TPQ An Nuur Desa Kutawuluh Rp 25 juta, serta TPQ Mujahadah Desa Danaraja Rp 25 juta.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengatakan, bantuan diberikan untuk memperlancar

proses pembangunan melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga penerima hibah.

"Dana hibah ini untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terseleenggaranya fungsi pemerintah," jelasnya. **(Mad)**

KARANGANYAR SELESAIKAN PELAYAN PUBLIK
Vaksinasi Pedagang Tunggu Giliran

KARANGANYAR (KR) - Vaksinasi Covid-19 untuk sekitar 9 ribu pedagang pasar tradisional di Kabupaten Karanganyar baru mencapai kisaran 30 persen. Sisanya menunggu penyelesaian vaksinasi pelayan publik dan lansia.

Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Karanganyar, Martadi mengatakan belum ada lagi suplai vaksin untuk pedagang dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karang-

anyar.

Sejauh ini, 30 persen pedagang yang sudah divaksin terdiri dari Pasar Tawangmangu, Karangpandan dan Pasar Malangiwan. "Sekarang belum ada suplai lagi. Kita menunggu alokasi dari DKK," tandasnya, Kamis (3/6).

Menurut Purwati Plt Kepala DKK Karanganyar, kiriman 1.500 vial vaksin pada pekan lalu langsung terpakai 1.500 vial, setara 15.000 injeksi.

Sasarannya lansia dan pelayan

publik yang masih menyisakan puluhan ribu orang.

"Kiriman terakhir itu melanjutkan vaksinasi dosis dua. Data menunjukkan, dari 85 ribu sasaran, sudah 40 persen lansia ter vaksin dari 85 ribu sasaran. Itu setara 34 ribu lansia yang sudah tervaksin," jelasnya.

Sekitar 50 persen pelayan publik dari total 54 ribu sasaran atau setara 27 ribu orang, lanjut Purwati, juga sudah tervaksinasi. Progres penyelesaian berlang-

sung signifikan karena distribusi logistik lancar. Diharapkan masyarakat bersabar menunggu giliran vaksinasi.

"Pemerintah Kabupaten Karanganyar melaksanakan vaksinasi sesuai prioritas yang telah ditentukan pemerintah pusat. Saat ini pemerintah pusat memprioritaskan vaksinasi untuk lansia dan pelayan publik. Vaksinasi untuk belasan ribu guru juga sudah berjalan secara bertahap," ungkap Purwati. **(Lim)**

HUKUM

RAYAKAN KELULUSAN DENGAN BERKONVOI KENDARAAN
Puluhan Pelajar Terjaring Razia



KR-Abdul Alim

Pelaku konvoi sepeda motor dibina di kantor polisi.

KARANGANYAR (KR) - Petugas Polres Karanganyar mengamankan belasan sepeda motor dan membina puluhan pemuda yang terjaring konvoi kelulusan SMK pada Kamis (3/6) malam. Mereka terkena sanksi tilang akibat ugall-ugalan serta menggunakan sepeda motor tidak standar.

Kapolsek Tawangmangu, AKP Ismugianto, mengatakan razia terhadap pelajar yang berkonvoi dilakukan di dua ruas. Yakni di jalan baru (jalan tembus ke Cemoro Kandang) dan jalan lama di wilayah Kelurahan Blumbang.

"Ada puluhan siswa dan sepeda motor yang terjaring razia. Sejauh ini 17 sepeda motor diamankan dan 34 pelajar dibina di Mapolsek. Kendaraan yang tak sesuai spesifikasi teknis, kami minta untuk dilengkapi," jelasnya.

Kasubag Humas Polres Karanganyar Iptu Agung Prawoko mengatakan, razia untuk mencegah konvoi dilakukan semua jajaran Polsek di 17 kecamatan. "Razia pada Kamis petang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan. Aksi konvoi juga mengganggu pengguna jalan lainnya," jelasnya.

Sementara itu pantauan *KR* di sejumlah ruas jalan, puluhan sepeda motor yang dikendarai partisipan konvoi melintas di Jalan Sragen-Solo wilayah Kebakramat. Rombongan itu menuju ke arah selatan sambil membunyikan knalpot bising. Dari gelagatnya, para pemuda

berseragam penuh coretan cat itu berniat merayakan kelulusannya.

Di beberapa ruas jalan wilayah Kecamatan Kerjo juga berkumpul kelompok pelajar berpenampilan sama. Mereka mengenakan celana panjang abu-abu dan seragam putih bernoda aneka warna. Bahkan muka dan rambut juga dicat warna. Dari wilayah ini sebanyak 30 pelajar diangkut di Mapolsek untuk menerima pembinaan.

Satlantas Polres Karanganyar menerjunkan personelnya guna mengamankan sejumlah titik yang dianggap rawan menjadi titik kumpul konvoi. "Kami menerjunkan 50 personel kami yang bekerjasama dengan seluruh aparat Polres Karanganyar," kata KBO Satlantas, Ipda Anggoro Wahyu.

Antisipasi konvoi ini selain demi mencegah kerumunan Covid-19 juga untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas dan gesekan antara pengendara. Ia memastikan lokasi wisata seperti Tawangmangu menjadi tujuan titik kumpul.

Ipda Anggoro menegaskan pihaknya tak segan akan memberi sanksi bagi siswa yang melanggar aturan tersebut serta mengangkut sepeda motornya ke markas. Selanjutnya, akan memanggil orangtua dan guru sekolahnya.

"Kami tak segan akan memberikan sanksi tilang bagi yang nekat untuk konvoi," tegasnya. **(Lim)**

KASUS PEMBUNUHAN DI DERMAGA ADIKARTO
Rekonstruksi, Tersangka Peragakan 36 Adegan

WATES (KR) - Satreskrim Polres Kulonprogo, Kamis (3/6) menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka, NAF (22) warga Pengasih terhadap TS (21) warga Pengasih, Kamis (3/6).

Diketahui, TS ditemukan tewas di dalam gedung Dermaga Adikarto Glagah Temon 2 April lalu.

Kasat Reskrim Polres Kulonprogo, AKP Munarso, mengungkapkan pelaku pembunuhan terhadap TS sama dengan pelaku pembunuhan terhadap DAS (21) warga Wates, yakni NAF. Namun TKP dalam perkara ini adalah di gedung Dermaga Adikarto Glagah.

Pelaksanaan rekonstruksi merupakan salah satu metode penyidikan guna mencocokkan dengan Berita Acara Pencocokan (BAP) untuk mengambil kesimpulan tindak pidana atau pasal yang akan diterapkan terhadap tersangka.

Proses rekonstruksi ini dilaksanakan di tiga lokasi, yakni di sebuah warung dekat Pelabuhan Karangwuni Wates, Dermaga Adikarto Glagah Temon dan Stasiun Wates. Dalam rekonstruksi yang dihadiri tim advokat yang membela hak-hak tersangka dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kulonprogo, tersangka memperagakan sebanyak 36 adegan.

Dari rekonstruksi ini, diketahui tersangka mengajak korban jalan-jalan mengendarai sepeda motor ke Dermaga Glagah. Sebelumnya, mereka mampir sebuah warung di de-

kat Pelabuhan Karangwuni Wates. Tersangka membeli minuman soda dan obat sakit kepala. Minuman tersebut oleh tersangka dicampur enam butir obat sakit kepala dan diberikan kepada korban. Saat korban mengalami pusing, tersangka mengangkat dan menjatuhkan tubuh korban hingga kepala membentur lantai. Tersangka kemudian menyeret tubuh korban ke dalam bangunan.

"Kesimpulan awal di lapangan, rekonstruksi ini sudah sesuai dengan alat bukti yang kami dapatkan dalam proses penyidikan, sehingga

tersangka dapat disangkakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara," jelasnya.

Kasus ini bisa dikatakan berantai karena sebelum membunuh dua korban, tersangka melakukan aksi serupa terhadap R warga Pengasih dengan cara mencampur obat sakit kepala dalam makanan soto. Namun, aksi tersangka gagal karena R tidak mengetahui makanan karena rasanya tidak enak. Sedangkan aksi tersangka terhadap C warga Purworejo juga tidak berhasil karena orang tua dari C selalu menelpon. **(R-2)**



KR-Dani Ardiyanto

Rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan NAF terhadap TS di gedung Dermaga Adikarto Glagah.

Tak Beri THR, Pedagang Buah Dianiaya

PURBALINGGA (KR) - BM (21) warga Bobotsari dan BH (21) warga Toyareka Kemangkong Purbalingga diamankan petugas Polsek Bobotsari. Keduanya dituduh melakukan penganiayaan terhadap Walestiono Wibowo (47) pedagang buah warga Desa Kabunderan Karanganyar Purbalingga.

"Penganiayaan terjadi di Pasar Bobotsari pada 13 Mei lalu," tutur Kabag Ops Polres Purbalingga Kompol Pujiono, Jumat (4/6).

Pujiono didampingi Kasubbag Humas Iptu Widayastuti dan Kanit

Reskrim Polsek Bobotsari Aipda Toni Wijaya, mengungkapkan penganiayaan bermula saat dua pelaku yang dalam kondisi terpengaruh miras mendatangi lapak buah milik korban. Kedua pelaku meminta uang kepada korban dengan dalih untuk THR karena saat itu bertepatan dengan Hari Idul Fitri.

"Korban menolak memberi uang. Kemudian pelaku mencekik korban dan memukulinya dengan balok kayu," ujarnya.

Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka. Jari tangan kanannya

patah tulang. Setelah melakukan pemeriksaan di rumah sakit, korban melaporkan kejadian pengeroyokan ke Polsek Bobotsari.

Dari laporan korban dan keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil mengetahui identitas pelaku dan menangkapnya. Atas Perbuatannya, keduanya dikenakan Pasal 170 ayat (1) tentang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama.

"Ancaman hukuman pasal tersebut yaitu pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan," ujarnya. **(Rus)**